



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUSTIMAN
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 405828

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 424.900.000

1. Tanah Seluas 998 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 110.500.000
2. Tanah Seluas 1169 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 167.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/81 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 77.400.000
4. Tanah Seluas 918 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 111.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI NINJA RR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI COLT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 61.500.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.500.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.959.084

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 563.359.084



III. HUTANG

Rp. 181.177.274

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 382.181.810

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.